



Analysis Of The Efficiency Of State-Owned Assets Management Based On Performance Indicators In Supporting Economic Growth (SDG 8)

Analisis Efisiensi Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Indikator Kinerja Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8)

Gloria Kartika Simbolon ¹⁾; Aulia ²⁾; Maya Macia Sar ⁱ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ gloriikartika@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

State Property, Performance
Indicators, Labor Absorption.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berbasis indikator kinerja terhadap kontribusinya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 8, khususnya aspek penyerapan tenaga kerja. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 13 Kementerian/Lembaga periode 2021–2024, penelitian ini menguji pengaruh empat indikator kinerja utama—produktivitas dan akuntabilitas (X1), kepatuhan regulasi (X2), efektivitas pengawasan (X3), dan administrasi BMN (X4)—terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) sebagai proksi SDG 8. Hasil analisis regresi data panel dengan model Fixed Effect menunjukkan bahwa hanya variabel produktivitas dan akuntabilitas (X1) yang berpengaruh positif dan signifikan secara parsial. Namun, keempat indikator secara simultan terbukti berpengaruh signifikan dan mampu menjelaskan 68,98% variasi penyerapan tenaga kerja. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan pengelolaan BMN berbasis kinerja, terutama yang berfokus pada optimalisasi nilai ekonomi aset, memiliki kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja, sesuai dengan agenda SDG 8.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of State-Owned Assets (BMN) management efficiency based on performance indicators on its contribution to supporting Sustainable Development Goal (SDG) 8, particularly the aspect of employment absorption. Using a quantitative approach with panel data from 13 Ministries/Agencies for the 2021–2024 period, this research examines the influence of four main performance indicators—productivity and accountability (X1), regulatory compliance (X2), supervision effectiveness (X3), and BMN administration (X4)—on employment absorption (Y) as a proxy for SDG 8. The results of panel data regression analysis with the Fixed Effect model show that only the productivity and accountability variable (X1) has a positive and significant partial effect. However, all four indicators simultaneously have a significant influence and can explain 68.98% of the variation in employment absorption. These findings confirm that a performance-based BMN management approach, especially one focused on optimizing the economic value of assets, makes a tangible contribution to driving inclusive economic growth and job creation, in line with the SDG 8 agenda.

PENDAHULUAN

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset strategis pemerintah yang memiliki nilai ekonomi sangat besar. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022, total nilai BMN mencapai Rp7.048,86 triliun atau lebih dari 50% dari total aset pemerintah (Firmansyah, 2024). Aset ini meliputi tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur, dan aset tidak berwujud lainnya yang seharusnya dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan BMN masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti banyaknya aset yang menganggur (*idle*), ketidakpatuhan terhadap regulasi pelaporan, lemahnya pengawasan, dan ketidaklengkapan dokumen administrasi (Maulanii et al., 2025).

Permasalahan ini tidak hanya menyebabkan pemborosan sumber daya negara, tetapi juga mengurangi potensi kontribusi BMN terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai contoh, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan BMN masih sering di bawah target, dan banyak aset strategis seperti gedung atau lahan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi (Yuhani & Setyaningrum, 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih terukur dan berbasis kinerja.

Untuk meningkatkan tata kelola BMN, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan BMN Berbasis Kinerja. Regulasi ini menekankan pentingnya indikator kinerja sebagai alat ukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset negara. Indikator

tersebut mencakup empat sasaran strategis: (1) produktivitas dan akuntabilitas, (2) kepatuhan terhadap regulasi, (3) efektivitas pengawasan, dan (4) keandalan administrasi (Kemenkeu, 2021). Melalui indikator ini, kinerja pengelolaan BMN dapat dievaluasi secara objektif dan diharapkan mampu mendorong kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi indikator kinerja tersebut telah mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan BMN dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 8, yaitu "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi". SDG 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang produktif (ILO, 2021). Dalam konteks ini, pengelolaan BMN yang efisien dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong investasi, meningkatkan produktivitas sektor publik, dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional (Lou et al., 2024).

Namun, hingga saat ini masih terbatas penelitian yang mengkaji hubungan antara efisiensi pengelolaan BMN berbasis indikator kinerja dengan kontribusinya terhadap SDG 8, khususnya dari perspektif kuantitatif dengan data panel. Beberapa studi sebelumnya lebih banyak bersifat kualitatif atau terfokus pada aspek administratif semata, seperti penelitian Putra et al. (2022) yang mengkaji efektivitas pengelolaan BMN di tingkat daerah, atau Yuhani dan Setyaningrum (2023) yang mengevaluasi penerapan Indeks Pengelolaan Aset (IPA). Sementara itu, penelitian yang menghubungkan kinerja pengelolaan BMN dengan outcome makroekonomi seperti penyerapan tenaga kerja masih jarang dilakukan.

Dalam konteks pencapaian target pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8), pemahaman terhadap determinan kemiskinan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif, termasuk optimalisasi Barang Milik Negara (BMN). Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten mengidentifikasi bahwa tingkat kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh variabel makroekonomi semata, tetapi juga oleh faktor struktural dan aksesibilitas terhadap kebutuhan dasar. Berdasarkan analisis data Susenas, faktor-faktor seperti pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf), akses terhadap sanitasi layak, sumber air bersih, serta ketersediaan listrik memiliki korelasi signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga. Selain itu, fluktuasi harga komoditas pangan strategis, terutama beras dan rokok kretek filter, juga menjadi pendorong utama garis kemiskinan karena porsi yang dominan dalam struktur pengeluaran rumah tangga miskin, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di sisi ketenagakerjaan, peningkatan setengah pengangguran (*underemployment*) dan tingkat pengangguran terbuka, khususnya pada kelompok laki-laki di perkotaan, turut memperburuk daya beli masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kemiskinan urban (Republika, 2026). Oleh karena itu, intervensi melalui pengelolaan aset negara yang efisien diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* dengan mendorong aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat memitigasi faktor-faktor risiko kemiskinan tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif. Fitrianasari (2021) menganalisis dampak globalisasi, kebijakan fiskal, dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di 9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan regresi data panel periode 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) dengan *adjusted R-squared* sebesar 95,8 persen. Secara parsial, variabel globalisasi yang diprosikan dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan keterbukaan perdagangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPEI. Variabel kebijakan fiskal yang diukur melalui persentase pengeluaran kesehatan dan pendidikan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Selain itu, variabel modal manusia yang diprosikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sementara Yoga dan Diputra (2024) menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemediasi di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2013-2022 menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan IPM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa PAD dan IPM tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan, namun secara tidak langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai pemediasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel antara yang mentransmisikan pengaruh PAD dan IPM dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengaruh efisiensi pengelolaan BMN berbasis indikator kinerja terhadap penyerapan tenaga kerja



sebagai proksi dari kontribusi terhadap SDG 8. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 13 Kementerian/Lembaga pemerintah pusat periode 2021–2024. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur manajemen aset publik dan ekonomi pembangunan, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang praktis bagi pemerintah dalam mengoptimalkan peran BMN sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian integral dari tata kelola keuangan publik yang bertujuan untuk memastikan aset negara digunakan secara efisien, akuntabel, dan memberikan nilai tambah ekonomi. Secara konseptual, pengelolaan BMN mencakup siklus perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset (Sigarlaki, Kalangi, & Wokas, 2025). Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.06/2021 yang menekankan pendekatan berbasis kinerja dengan empat indikator utama: produktivitas dan akuntabilitas, kepatuhan regulasi, efektivitas pengawasan, dan keandalan administrasi (Kemenkeu, 2021).

Efisiensi dalam konteks ini merujuk pada kemampuan untuk mencapai hasil optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal, baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga (Aftinia, 2018; Sari et al., 2024). Dalam pengelolaan aset publik, efisiensi tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap outcome pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Farrell, 1957; Sumaryana, Komara, & Pancasilawan, 2024). Sementara itu, Sustainable Development Goal (SDG) 8 berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta penciptaan pekerjaan layak (ILO, 2021). Terdapat hubungan potensial antara tata kelola aset negara yang baik dengan pencapaian tujuan ini, karena aset yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pendapatan negara dan pendorong aktivitas ekonomi (Lou et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek pengelolaan BMN. Penelitian kualitatif oleh Putra et al. (2022) mengungkapkan bahwa efektivitas pengelolaan BMN di tingkat daerah masih rendah akibat ketidaksesuaian data, sistem informasi yang tidak terintegrasi, dan lemahnya pengawasan. Sementara itu, Yuhani dan Setyaningrum (2023) mengevaluasi penerapan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan menemukan bahwa sebagian besar Kementerian/Lembaga belum optimal dalam penerapannya karena keterbatasan SDM, sistem, dan integrasi dengan sistem keuangan.

Penelitian lain oleh Sahetapy (2022) yang berfokus pada kinerja pegawai dalam pengelolaan BMN di BPKAD Provinsi Maluku menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas masih dalam kategori cukup. Studi mengenai aspek teknologi dilakukan oleh Mandayuni (2024) dan Razak & Nasution (2022) yang mengkaji efektivitas sistem elektronik SIMAK-BMN. Mereka menemukan bahwa meskipun sistem tersebut membantu efisiensi administratif, namun efektivitasnya masih terganggu oleh kendala teknis dan kapasitas SDM.

Pada tataran kebijakan, Firmansyah (2024) menganalisis optimalisasi sistem informasi BMN (SIMAN dan SIMAK-BMN) sebagai solusi teknologi untuk transparansi dan efisiensi. Sementara itu, penelitian Maulanii et al. (2025) mengidentifikasi masalah legalitas aset, seperti ketiadaan sertifikat, sebagai hambatan dalam pemanfaatan BMN. Di sisi lain, studi Sumaryana dkk. (2024) menekankan perlunya pendekatan tata kelola aset daerah yang holistik, tidak hanya berfokus pada pencatatan, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi.

Beberapa peneliti juga telah mulai menghubungkan pengelolaan aset dengan dampak makroekonomi. Misalnya, penelitian Adnan (2025) mengevaluasi pengelolaan aset publik di Kota Serang dan menyimpulkan bahwa optimalisasi aset yang berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan. Laporan Bank Pembangunan Amerika (IDB) oleh Mejía et al. (2024) juga menunjukkan bahwa negara dengan kematangan pengelolaan aset publik yang tinggi dapat menghemat belanja infrastruktur hingga 15-20%. Selain itu, studi Lubis et al. (2024) mengkaji pengaruh efektivitas pengelolaan aset publik, digitalisasi, dan transparansi terhadap keberlanjutan fiskal.

Namun, berdasarkan tinjauan literatur tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gaps*) yang menjadi dasar dilakukannya studi ini. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu bersifat kualitatif, deskriptif, atau terfokus pada evaluasi sistem dan kepatuhan administratif semata (Putra et al., 2022; Sahetapy, 2022; Yuhani & Setyaningrum, 2023). Masih terbatas penelitian kuantitatif yang mengukur hubungan empiris antara indikator kinerja pengelolaan BMN dengan *outcome* ekonomi nyata.

Kedua, penelitian yang menghubungkan secara langsung pengelolaan BMN dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 8, masih sangat jarang. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada aspek tata kelola internal, sementara keterkaitannya dengan indikator makro

seperti penyerapan tenaga kerja atau pertumbuhan ekonomi belum banyak dieksplorasi secara sistematis dan empiris.

Ketiga, penelitian dengan pendekatan data panel untuk menganalisis dinamika kinerja pengelolaan BMN dari waktu ke waktu dan antar institusi masih minim. Kebanyakan penelitian bersifat *cross-sectional* atau studi kasus tunggal, sehingga kurang dapat menangkap variasi dan tren kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan:

1. Menganalisis pengaruh efisiensi pengelolaan BMN berbasis indikator kinerja (produktivitas-akuntabilitas, kepatuhan, pengawasan, administrasi) secara kuantitatif terhadap kontribusi terhadap SDG 8 yang diprosikan melalui penyerapan tenaga kerja.
2. Menggunakan data panel dari 13 Kementerian/Lembaga periode 2021–2024 untuk mendapatkan temuan yang lebih kokoh dan mampu menangkap efek tetap individu dan dinamika waktu.
3. Memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana implementasi PMK 207/PMK.06/2021 telah berkontribusi tidak hanya pada perbaikan tata kelola internal, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang manajemen aset publik dan ekonomi pembangunan, sekaligus memberikan implikasi kebijakan yang relevan bagi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran BMN untuk pertumbuhan ekonomi inklusif.

Penggunaan metode analisis regresi data panel dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang sah dan telah banyak diadopsi dalam berbagai studi empiris di bidang ekonomi dan keuangan publik. Regresi data panel menggabungkan data time series dan cross section sehingga mampu menangkap heterogenitas antar individu sekaligus dinamika antar waktu secara lebih komprehensif dibandingkan metode regresi biasa (Gujardi, 2004). Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya mengontrol variabel-variabel yang tidak teramati (*unobserved heterogeneity*) yang bersifat spesifik individu maupun waktu, sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi lebih efisien dan tidak bias. Dalam konteks pengelolaan aset publik, penelitian oleh Fitrianasari (2021) menjadi contoh relevan yang menggunakan regresi data panel untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Studi tersebut menggunakan data sekunder periode 2011-2020 dengan model *Fixed Effect Model Cross-Section SUR* dan berhasil membuktikan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan nilai adjusted R-squared sebesar 95,8 persen. Keberhasilan penelitian tersebut dalam menghasilkan temuan yang robust menunjukkan bahwa analisis regresi data panel merupakan alat analisis yang valid dan dapat diandalkan untuk menguji hubungan empiris antar variabel dalam studi yang menggunakan data sekunder. Dengan demikian, penerapan metode yang sama dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh efisiensi pengelolaan BMN berbasis indikator kinerja terhadap penyerapan tenaga kerja periode 2021-2024 memiliki justifikasi metodologis yang kuat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengukur pengaruh variabel independen secara akurat, tetapi juga menangkap karakteristik unik masing-masing Kementerian/Lembaga serta dinamika kebijakan dari waktu ke waktu, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi empiris yang berarti bagi pengembangan literatur manajemen aset publik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain non-eksperimental. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk panel (*pooled time-series cross-section*) yang mencakup 13 Kementerian/Lembaga pemerintah pusat (dimensi silang) selama periode 2021 hingga 2024 (dimensi waktu). Data kinerja utama diambil dari sistem resmi pemerintah, yaitu Aplikasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAN), sementara data penyerapan tenaga kerja diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Analisis data dilakukan dengan teknik regresi data panel. Variabel dependen adalah Penyerapan Tenaga Kerja (Y) sebagai proksi kontribusi terhadap SDG 8. Empat variabel independen adalah indikator kinerja pengelolaan BMN: Produktivitas & Akuntabilitas (X1), Kepatuhan Regulasi (X2), Efektivitas Pengawasan (X3), dan Administrasi BMN (X4). Pemilihan model regresi terbaik antara Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect Model ditentukan melalui serangkaian uji spesifikasi, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Seluruh pengolahan data dan pengujian statistik dilakukan dengan perangkat lunak EViews 12. Setelah model terpilih, dilakukan uji asumsi klasik, uji hipotesis parsial (Uji t) dan simultan (Uji F), serta interpretasi koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kekuatan penjelas model. Metode yang dijelaskan ini memungkinkan penelitian direplikasi dengan kondisi data yang serupa.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengambil objek analisis berupa kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada 13 (tiga belas) Kementerian/Lembaga pemerintah pusat yang dipilih secara purposif, yaitu Kementerian Keuangan, Pertanian, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Perdagangan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Koperasi, serta Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pemilihan objek ini didasarkan pada kriteria bahwa instansi-instansi tersebut telah memiliki data kinerja pengelolaan BMN yang lengkap dalam aplikasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) periode 2021-2024 dan memiliki mandat strategis serta portofolio aset yang berdampak langsung pada sektor riil ekonomi, seperti infrastruktur, produksi, investasi, dan perdagangan, sehingga kontribusi efisiensi pengelolaan BMN-nya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dapat diukur secara lebih signifikan.

Pengujian *Fixed Effect Model* (FEM) dilakukan melalui Uji Chow untuk menilai apakah model yang paling sesuai adalah *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila hasil pengujian menerima hipotesis nol (H_0), maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Sebaliknya, jika hipotesis alternatif (H_a) diterima, maka *Fixed Effect Model* (FEM) menjadi model yang digunakan. Adapun hasil pengujian menggunakan Uji Chow disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 12 (2026)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6564.827310	(12,35)	0.0000
Cross-section Chi-square	401.413181	12	0.0000

Hasil Uji *Chow* menunjukkan nilai probabilitas (Prob.) 0.0000 untuk kedua statistik uji (*Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square*), yang berarti H_0 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat efek tetap spesifik individu (perbedaan karakteristik tetap antar instansi) yang signifikan dalam model panel data. Dengan demikian, model yang lebih sesuai adalah *Fixed Effect Model* (FEM), bukan *Common Effect Model* (CEM), karena terdapat variasi yang signifikan antar 13 kementerian/lembaga sampel yang perlu ditangkap melalui pendekatan efek tetap.

Uji *Hausman* digunakan untuk menilai model regresi data panel yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Hasil pelaksanaan Uji *Hausman* dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.364306	4	0.2519

Hasil Uji *Hausman* menunjukkan nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0.2519, yang berarti gagal menolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi antara efek spesifik individu (*random effects*) dengan variabel independen dalam model panel data. Dengan demikian, model yang lebih sesuai adalah *Random Effect Model* (REM), bukan *Fixed Effect Model* (FEM), karena REM lebih efisien secara statistik dalam kondisi ini dan perbedaan karakteristik antar instansi dapat dianggap bersifat acak (*random*) serta tidak berkorelasi dengan variabel penjelas dalam model.

Pengujian terhadap *Common Effect Model* (CEM) dilakukan dengan menggunakan Uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan apakah model yang lebih sesuai adalah *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM). Apabila hasil pengujian menerima hipotesis nol (H_0), maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Sebaliknya, jika hipotesis alternatif (H_a) diterima, maka

Random Effect Model (REM) dipilih sebagai model yang paling tepat. Adapun hasil pengujian dengan Uji Lagrange Multiplier disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	68.93654 (0.0000)	2.010804 (0.1562)	70.94734 (0.0000)

Hasil Uji Lagrange Multiplier (*Breusch-Pagan*) untuk *cross-section* menunjukkan nilai probabilitas 0.0000, yang berarti menolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat efek acak spesifik individu (*random effects*) yang signifikan antar instansi dalam model panel data. Oleh karena itu, model *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan daripada *Pooled Least Square* (*Common Effect Model*). Namun, karena hasil Uji *Hausman* sebelumnya merekomendasikan REM dan Uji *Lagrange Multiplier* ini mendukung adanya efek acak, maka REM merupakan pilihan model yang konsisten untuk analisis data panel penelitian.

Analisis data panel merupakan pendekatan pengolahan data yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* merujuk pada data yang dikumpulkan dari berbagai unit pengamatan dalam satu periode tertentu, sedangkan data *time series* adalah data yang dihimpun secara berurutan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan dinamika atau perubahan suatu fenomena. Adapun hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Panel dengan Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/17/26 Time: 08:06
 Sample: 2021 2024
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 13
 Total panel (balanced) observations: 52

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10982.65	7175.279	1.530623	0.1349
X1	171.5329	53.75041	3.191284	0.0030
X2	-11.37184	141.5094	-0.080361	0.9364
X3	-10.79014	55.83258	-0.193259	0.8479
X4	-93.90919	96.74407	-0.970697	0.3384

Berdasarkan hasil analisis regresi panel yang disajikan, persamaan regresi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = 9363,527 + 170,6166X1 + 14,23026X2 + 3,214307X3 - 104,6062X4 + \epsilon$$

Konstanta (α) sebesar 9363,527 mengindikasikan bahwa jika semua variabel independen—Produktivitas dan Akuntabilitas (X1), Kepatuhan Regulasi (X2), Efektivitas Pengawasan (X3), dan Administrasi BMN (X4)—dianggap bernilai nol, maka Penyerapan Tenaga Kerja (Y) diperkirakan telah mencapai 9363,527 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kontribusi dari upaya pengelolaan BMN berbasis indikator kinerja, sektor-sektor terkait instansi pemerintah telah memiliki kapasitas dasar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan.

Koefisien regresi untuk variabel Produktivitas dan Akuntabilitas (X1) sebesar 170,6166 mengindikasikan pengaruh positif dan signifikan. Setiap peningkatan satu satuan persen pada realisasi PNBPN BMN akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 170,6166 ribu orang. Pengaruh ini



signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% (probabilitas $0,0029 < 0,01$), yang menegaskan bahwa optimalisasi nilai ekonomi aset negara secara langsung dan bermakna berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, koefisien variabel Kepatuhan Regulasi (X2) sebesar 14,23026 menunjukkan arah pengaruh yang positif, namun tidak signifikan secara statistik (probabilitas $0,9003 > 0,05$). Artinya, meskipun secara teoretis peningkatan kepatuhan pelaporan administratif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, dalam periode penelitian ini hubungan langsungnya dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja belum dapat dibuktikan secara statistik.

Demikian pula, koefisien variabel Efektivitas Pengawasan (X3) sebesar 3,214307, meskipun bernilai positif, sangat kecil dan tidak signifikan (probabilitas $0,6650 > 0,05$). Temuan ini mengisyaratkan bahwa penurunan temuan audit berulang, sebagai proksi efektivitas pengawasan, memiliki pengaruh yang sangat terbatas dan tidak langsung terhadap pertumbuhan lapangan kerja dalam jangka pendek.

Terakhir, koefisien variabel Administrasi BMN (X4) bernilai negatif, yaitu -104,6062, namun juga tidak signifikan (probabilitas $0,2772 > 0,05$). Koefisien negatif ini dapat merefleksikan kompleksitas hubungan di mana peningkatan rasio sertifikasi aset tidak serta-merta berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja baru, dan mungkin terkait dengan karakteristik spesifik aset atau sektor yang diamati.

Pada pengujian parsial (uji t), analisis dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian tersebut menggunakan uji t dengan memperhatikan nilai probabilitas (p-value) pada tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Suatu hipotesis parsial dinyatakan signifikan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Ringkasan hasil pengujian pengaruh variabel produktivitas dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengawasan, serta administrasi BMN terhadap pertumbuhan ekonomi disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/16/26 Time: 22:14
Sample: 2021 2024
Periods included: 4
Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 52

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9363.527	2585.701	3.621273	0.0009
X1	170.6166	53.36696	3.197046	0.0029
X2	14.23026	112.8204	0.126132	0.9003
X3	3.214307	7.360512	0.436696	0.6650
X4	-104.6062	94.77131	-1.103775	0.2772

Berdasarkan hasil analisis regresi panel pada penelitian, berikut adalah interpretasi uji t (parsial) untuk setiap variabel dengan t tabel = 2,012 dan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$:

Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung yang dimiliki untuk variabel Produktivitas dan Akuntabilitas (X1) sebesar 3,197046 dengan nilai t tabel sebesar 2,012. Diketahui bahwa nilai t hitung $>$ t tabel, yaitu $3,197046 > 2,012$, maka tolak H_0 dan terima H_1 . Nilai probability t dari variabel X1 sebesar 0,0029, di mana nilai ini lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hasil pengujian memenuhi kriteria t hitung $>$ t tabel dan probability $<$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Produktivitas dan Akuntabilitas (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung untuk variabel Kepatuhan Regulasi (X2) sebesar 0,126132 dengan t tabel 2,012. Karena t hitung $<$ t tabel ($0,126132 < 2,012$), maka terima H_0 dan tolak H_1 . Nilai probability t variabel X2 adalah 0,9003, jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil pengujian tidak memenuhi syarat t hitung $>$ t tabel dan probability $<$ 0,05, sehingga disimpulkan bahwa Kepatuhan Regulasi (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y).

Hasil uji t menunjukkan t hitung variabel Efektivitas Pengawasan (X3) sebesar 0,436696, lebih kecil dari t tabel 2,012 ($0,436696 < 2,012$), sehingga terima H_0 dan tolak H_1 . Nilai probability t

sebesar $0,6650 > 0,05$. Oleh karena itu, Efektivitas Pengawasan (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Hasil uji t menunjukkan t hitung variabel Administrasi BMN (X4) sebesar $-1,103775$ (nilai absolut = $1,103775$). Karena $|t \text{ hitung}| < t \text{ tabel}$ ($1,103775 < 2,012$), maka terima H_0 dan tolak H_1 . Nilai probability t sebesar $0,2772 > 0,05$. Dengan demikian, Administrasi BMN (X4) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Berdasarkan hasil uji t, hanya variabel Produktivitas dan Akuntabilitas (X1) yang berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y). Variabel X2, X3, dan X4 tidak signifikan secara parsial. Variabel yang paling berpengaruh adalah Produktivitas dan Akuntabilitas (X1) karena memiliki nilai $|t \text{ hitung}|$ terbesar ($3,197046$) dan *probability* terkecil ($0,0029$).

Pada pengujian simultan, analisis dilakukan untuk menilai pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian ini menggunakan uji F dengan cara membandingkan nilai probabilitas (p-value) dari statistik F dengan tingkat signifikansi sebesar $0,05$. Jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen tersebut secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ringkasan hasil pengujian pengaruh bersama produktivitas dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengawasan, serta administrasi BMN terhadap pertumbuhan ekonomi disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Weighted Statistics			
R-squared	0.689837	Mean dependent var	144.1583
Adjusted R-squared	0.663440	S.D. dependent var	445.7484
S.E. of regression	258.5957	Sum squared resid	3142971.
F-statistic	26.13325	Durbin-Watson stat	0.582548
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada analisis regresi panel, diperoleh nilai F hitung sebesar $26,13325$ dengan probabilitas F sebesar $0,000000$. Dengan membandingkan nilai F hitung tersebut terhadap F tabel sebesar $2,805$ (pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$), dapat disimpulkan bahwa F hitung $>$ F tabel ($26,13325 > 2,805$) dan probabilitas F $<$ $0,05$ ($0,000000 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel-variabel independen yaitu Produktivitas dan Akuntabilitas (X1), Kepatuhan Regulasi (X2), Efektivitas Pengawasan (X3), dan Administrasi BMN (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Penyerapan Tenaga Kerja (Y). Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik telah layak dan dapat diandalkan untuk menjelaskan hubungan antara efisiensi pengelolaan BMN berbasis indikator kinerja dengan penyerapan tenaga kerja sebagai kontribusi terhadap pencapaian SDGs 8.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana produktivitas dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengawasan, serta administrasi BMN mampu menjelaskan variasi dalam pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian koefisien determinasi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.689837	Mean dependent var	144.1583
Adjusted R-squared	0.663440	S.D. dependent var	445.7484
S.E. of regression	258.5957	Sum squared resid	3142971.
F-statistic	26.13325	Durbin-Watson stat	0.582548
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada analisis regresi panel, diperoleh nilai R-squared (R^2) sebesar $0,689837$ atau $68,98\%$, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model yaitu Produktivitas dan Akuntabilitas (X1), Kepatuhan Regulasi (X2), Efektivitas Pengawasan (X3), dan Administrasi BMN (X4) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen



Penyerapan Tenaga Kerja (Y) sebesar 68,98%, sementara sisanya sebesar 31,02% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,663440 atau 66,34% mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan observasi, kontribusi variabel independen tetap signifikan dalam memprediksi penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, model regresi yang dibangun memiliki daya jelas yang kuat dan dapat diandalkan untuk menganalisis pengaruh efisiensi pengelolaan BMN berbasis indikator kinerja terhadap kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja sesuai SDGs 8.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis data panel dengan model *Fixed Effects* terhadap pengaruh efisiensi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diukur melalui indikator kinerja, yaitu Produktivitas dan Akuntabilitas (X1), Kepatuhan terhadap Regulasi (X2), Efektivitas Pengawasan (X3), serta Administrasi BMN (X4) terhadap kontribusi terhadap pencapaian SDG 8 yang diprosikan melalui Penyerapan Tenaga Kerja (Y) pada 13 Kementerian/Lembaga pemerintah pusat periode 2021–2024. Adapun interpretasi dari temuan-temuan analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Produktivitas dan Akuntabilitas (X1) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Produktivitas dan Akuntabilitas (X1) yang diprosikan dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BMN terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) dengan koefisien regresi sebesar 170,6166 dan nilai probabilitas 0,0029 ($< 0,01$). Temuan ini mendukung Hipotesis 1 (H1) dan selaras dengan landasan teori serta penelitian terdahulu.

Secara teoretis, pengelolaan aset negara yang produktif dan akuntabel merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Farrell (1957) mendefinisikan efisiensi sebagai kemampuan menghasilkan *output* maksimal dengan input minimal. Dalam konteks BMN, efisiensi ini tercermin dari optimalisasi pemanfaatan aset untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, termasuk di dalamnya penciptaan lapangan kerja. Lou et al., (2024) menegaskan bahwa pengelolaan BMN yang efisien berperan krusial dalam mendukung SDG 8, khususnya melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan penciptaan pekerjaan yang layak. Temuan Yuhani & Setyaningrum (2024) juga memperkuat bahwa indikator kinerja pengelolaan BMN, terutama realisasi PNBP, dapat menjadi alat ukur kontribusi aset negara terhadap *outcome* pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa peningkatan produktivitas BMN, yang ditandai dengan realisasi PNBP yang lebih baik, berkorelasi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. *Pertama*, PNBP yang optimal seringkali bersumber dari pemanfaatan aset negara seperti penyewaan gedung, lahan, atau kerja sama pengelolaan infrastruktur. Aktivitas ekonomi ini tidak hanya menghasilkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) dengan membuka lapangan kerja baru di sektor-sektor terkait, seperti jasa, perdagangan, dan konstruksi (Sumaryana et al., 2024). *Kedua*, aset negara yang dikelola secara produktif menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Kementerian seperti Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata yang berhasil mengoptimalkan asetnya cenderung lebih efektif dalam menarik investasi dan menggerakkan sektor riil, yang pada akhirnya menyerap tenaga kerja lebih banyak (Firmansyah, 2024). *Ketiga*, pendapatan dari PNBP dapat dialokasikan kembali (*re-invested*) oleh negara untuk program-program padat karya dan pembangunan infrastruktur yang secara langsung menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, temuan ini memberikan bukti empiris bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset publik tidak hanya berorientasi pada akuntabilitas fiskal, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa peningkatan produktivitas BMN yang ditandai dengan realisasi PNBP yang lebih baik berkorelasi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitrianasari (2021) yang menemukan bahwa variabel kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam konteks pengelolaan BMN, PNBP yang optimal dari pemanfaatan aset negara seperti penyewaan gedung dan kerja sama pengelolaan infrastruktur mampu menciptakan efek pengganda dengan membuka lapangan kerja baru di sektor terkait. Dengan demikian, temuan ini memberikan bukti empiris bahwa prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan aset publik tidak hanya berorientasi pada akuntabilitas fiskal, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengaruh Kepatuhan terhadap Regulasi (X2) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan terhadap Regulasi (X2), yang diukur melalui ketepatan waktu pelaporan LBP/RKBMN, tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) dengan koefisien positif 14,23026 namun probabilitas 0,9003 ($> 0,05$). Dengan demikian, Hipotesis 2 (H2) ditolak.

Temuan ini memberikan perspektif yang menarik. Di satu sisi, kepatuhan regulasi merupakan fondasi dari tata kelola yang baik (*good governance*) dan transparansi, sebagaimana ditegaskan dalam asas-asas pengelolaan BMN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Irvani, 2022). Kepatuhan administratif diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, mengurangi risiko, dan pada akhirnya mendukung iklim investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja. Namun, hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa dalam konteks hubungan langsung antara kepatuhan pelaporan administratif dengan penyerapan tenaga kerja, hubungannya tidak signifikan.

Pengaruh Efektivitas Pengawasan (X3) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Variabel Efektivitas Pengawasan (X3) yang diprosikan dengan persentase temuan berulang (*recurring finding*) juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) (koefisien 3,214307, probabilitas 0,6650). Hipotesis 3 (H3) ditolak.

Secara teori, sistem pengawasan yang efektif merupakan pilar utama dalam mencegah penyalahgunaan aset, memastikan akuntabilitas, dan mendorong pemanfaatan aset yang optimal untuk kepentingan publik (Kemenkeu, 2021; Listiyaningsih et al., 2025). Pengawasan yang baik diharapkan dapat meminimalkan pemborosan (*leakage*), sehingga sumber daya dapat dialokasikan ke kegiatan yang lebih produktif dan menciptakan lapangan kerja. Namun, ketidaksignifikan hasil ini dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang.

Pertama, proksi yang digunakan (temuan berulang) mungkin lebih mencerminkan kualitas tindak lanjut dari lembaga pengawas (seperti BPK dan Itjen) dan respon K/L terhadap rekomendasi, daripada secara langsung mengukur dampak ekonomi dari aktivitas pengawasan itu sendiri. Meskipun temuan berulang menurun (seperti tren dalam data), dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja bersifat tidak langsung dan terdistribusi dalam jangka waktu yang lebih panjang. *Kedua*, efek dari pengawasan yang efektif mungkin telah terinternalisasi dalam peningkatan produktivitas (X1). Artinya, pengawasan yang baik berkontribusi pada pemanfaatan aset yang lebih produktif (misalnya, dengan menindaklanjuti aset *idle*), dan peningkatan produktivitas inilah yang kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, pengaruh X3 terhadap Y mungkin telah tersalurkan melalui X1. *Ketiga*, seperti halnya X2, pengawasan merupakan fungsi *pengendalian* (*control function*) dalam siklus manajemen. Dampak ekonominya bersifat preventif dan korektif untuk menjaga *nilai* aset, sementara penciptaan lapangan kerja lebih merupakan hasil dari fungsi *pemanfaatan* dan *investasi* (*development function*) dari aset tersebut. Temuan ini mengingatkan bahwa meskipun pengawasan sangat penting untuk integritas pengelolaan keuangan negara (Kholik, 2024), klaim dampaknya terhadap indikator makroekonomi seperti ketenagakerjaan perlu dikaji dengan hati-hati dan melalui mekanisme sebab-akibat yang lebih terperinci.

Pengaruh Administrasi BMN (X4) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Administrasi BMN (X4) yang diukur dengan persentase BMN bersertifikat tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y), dengan koefisien negatif -104,6062 dan probabilitas 0,2772 ($> 0,05$). Hipotesis 4 (H4) ditolak.

Temuan ini cukup menantang karena landasan hukum yang kuat (sertifikat) diasumsikan sebagai prasyarat untuk pemanfaatan ekonomi aset. Maulanii et al. (2025) dan Sigarlaki et al. (2025) menekankan pentingnya kelengkapan dokumen legal untuk menghindari sengketa dan memungkinkan transaksi ekonomi seperti sewa, jual-beli, atau kerja sama. Namun, koefisien negatif (walaupun tidak signifikan) mengisyaratkan adanya kemungkinan hubungan yang kompleks.

Penjelasan yang mungkin adalah adanya faktor *intervening*. Sertifikasi adalah langkah awal (*enabler*) yang memungkinkan pemanfaatan, namun tidak serta merta menjamin pemanfaatan tersebut terjadi atau langsung menciptakan lapangan kerja. Bisa jadi, aset yang sudah bersertifikat justru merupakan aset-aset "mapan" yang pengelolaannya sudah berjalan dan tidak lagi menghasilkan pertumbuhan lapangan kerja yang signifikan. Sebaliknya, upaya percepatan sertifikasi mungkin justru sedang difokuskan pada aset-aset yang sebelumnya bermasalah dan *idle*, yang proses pemanfaatannya membutuhkan waktu lebih lama setelah sertifikasi selesai, sehingga dampak terhadap ketenagakerjaan belum terlihat dalam periode penelitian. Selain itu, koefisien negatif bisa merefleksikan bahwa instansi dengan tingkat sertifikasi tinggi (misalnya Kemenkeu) justru mengelola aset yang bersifat finansial/administratif dan kurang padat karya, sedangkan instansi yang mengelola aset padat karya (seperti PU, Pertanian) mungkin masih memiliki tantangan sertifikasi. Temuan ini menyoroti bahwa aspek



legal-administratif, meski fundamental, bukanlah *driver* langsung penciptaan lapangan kerja; ia adalah fondasi yang memungkinkan *driver* lain seperti produktivitas (X1) untuk beroperasi secara optimal.

Pengaruh Simultan Pengelolaan BMN Berbasis Indikator Kinerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Hasil uji F simultan menunjukkan bahwa keempat variabel indikator kinerja pengelolaan BMN (X1, X2, X3, X4) secara bersama-sama berpengaruh sangat signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y) dengan F-statistik = 26,13325 dan Probabilitas = 0,000000. Nilai R-squared sebesar 0,689837 menunjukkan bahwa model yang terdiri dari keempat variabel tersebut mampu menjelaskan sekitar 68,98% variasi dalam Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor-sektor yang terkait dengan 13 Kementerian/Lembaga sampel. Adjusted R-squared sebesar 0,663440 mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel, kontribusi eksplanatori model tetap kuat.

Temuan ini mendukung Hipotesis 5 (H5) dan merupakan konfirmasi empiris yang penting terhadap kerangka regulasi PMK 207/PMK.06/2021. Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan pengelolaan BMN berbasis indikator kinerja yang holistik—meliputi aspek produktivitas, kepatuhan, pengawasan, dan administrasi—secara kolektif memiliki daya penjas yang kuat terhadap kontribusi pemerintah dalam mendukung tujuan SDG 8, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan semangat *Sustainable Development Goals* yang menekankan pendekatan terintegrasi, di mana tata kelola yang baik (pilar tata kelola/kelembagaan) menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi inklusif (pilar ekonomi) (Ponto, 2023; Resosudarmo, 2021).

Namun, proporsi penjelasan variabel dependen yang belum mencapai 100% (sisanya sekitar 31,02%) mengisyaratkan bahwa masih terdapat beragam faktor penentu lain yang signifikan memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor strategis. Faktor-faktor tersebut mencakup variabel makroekonomi eksternal seperti tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi global yang memengaruhi ekspor dan investasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel, dapat disimpulkan bahwa produktivitas dan akuntabilitas pengelolaan BMN, yang diukur melalui realisasi PNPB, merupakan satu-satunya indikator kinerja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai wujud dukungan terhadap SDG 8. Sementara itu, indikator kepatuhan regulasi, efektivitas pengawasan, dan administrasi BMN tidak terbukti berpengaruh signifikan secara parsial, meskipun keempat indikator secara bersama-sama (simultan) memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor strategis pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis kinerja dalam pengelolaan BMN telah memberikan dampak ekonomi yang nyata, terutama ketika fokus diarahkan pada optimalisasi nilai ekonomi aset, yang selanjutnya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian di bidang ekonomi sektor publik sebelumnya yang menggunakan pendekatan regresi panel. Metodologis penelitian dengan regresi panel *time series* dan *cross section* konsisten menunjukkan bahwa regresi ini dapat menjelaskan hubungan signifikansi antar variabel yang diteliti meskipun dalam konteks variabel penelitian yang berbeda.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah dan Kementerian/Lembaga fokus pada kebijakan yang secara langsung meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi Barang Milik Negara, seperti optimalisasi aset idle menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan mendorong kerja sama pemanfaatan dengan sektor swasta, karena langkah-langkah ini terbukti paling signifikan menciptakan lapangan kerja dan mendukung SDG 8, sambil terus memperkuat aspek kepatuhan, pengawasan, dan administrasi sebagai fondasi tata kelola yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H. (2025). Evaluasi Pengelolaan Aset Publik untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Kota Serang Provinsi Banten. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 722–736.
- Aftinia, N. (2018). Analisis Efisiensi Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Laba Usaha Tahu (Pada UD. Pabrik Tahu Langgeng Gamong Kaliwungu Kudus). In *IAIN KUDUS*.

- Firmansyah, A. (2024). Optimalisasi SIMAN dan SIMAK-BMN: Solusi Teknologi untuk Transparansi dan Efisiensi BMN di Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 19(2), 186–199.
- Fitrianasari, R. N. (2021). Analisis Dampak Globalisasi, Kebijakan Fiskal, dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Kasus dengan Data Panel Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Bestari*, 1(2), 29–38.
- Gujardi, D. N. (2004). *Basic Econometrics (4th ed.)*. The McGraw-Hill Companies.
- Kemenkeu. (2021). *Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/Pmk.06/2021*. [Www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Listiyaningsih, Ismail, & Iryani, D. (2025). Konsep Pengawasan Tata Kelola Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(4), 1–9.
- Lou, J., Rader, A., Gultom, Y. M. L., Hilde, T. C., & Hultman, N. (2024). Navigating SDG 8 in the decarbonizing landscape of emerging economies: a case study of Indonesia. *Sustainable Earth Reviews*, 7(1), 26.
- Lubis, N., Lubis, N. K., Syardiansah, S., & Girma, A. G. (2024). The Influence of Public Asset Management Effectiveness, Digitalization and Transparency on Fiscal Sustainability: An International Literature Review. *Journal of Management and Business Innovations*, 6(02), 50–64.
- Mandayuni, I. (2024). Effectiveness of Electronic State Property Management in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2(1), 264–272.
- Maulanii, N. Z., Nugraha, D. S., & Putra, S. S. (2025). Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 5(2), 187–194.
- Mejia, M. G., De Mora, F. A., Brankevich, P., Roseth, B., & Bautista, S. N. (2024). Public Asset Management Maturity Assessment. *Inter-American Development Bank*, 1(1), 1–38. <https://doi.org/10.18235/0013203>
- Putra, I. H., Ismanto, S. U., & Runiawati, N. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda Bmd) Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. *JANE*, 14(1), 238–255.
- Razak, N., & Nasution, J. (2022). Analisis efektivitas penatausahaan barang milik negara melalui aplikasi SIMAK-BMN. *Alexandria: Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship*, 3(2), 39–41.
- Republika. (2026). *BPS Ungkap Beras dan Rokok Jadi Faktor Utama Dongkrak Garis Kemiskinan*. Republika.Co.Id.
- Sahetapy, P. (2022). Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. *Journal Administration and Public Service*, 3(1), 27–35.
- Sari, M. M., Aulia, & Naatura, F. D. (2024). Analysis of The Impact of Placements In Bi, Securities, and Loans Disbursed on Net Income of Banks Listed on The Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi*, 14(3), 241–252.
- Sigarlaki, J. Y., Kalangi, L., & Wokas, H. R. N. (2025). Analisis Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Sorong Papua Barat Daya menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181 Tahun 2016. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 227–236. <https://doi.org/10.58784/rapi.314>
- Sumaryana, A., Komara, S. R., & Pancasilawan, R. (2024). Rethinking Local Government Asset Management in Indonesia: Governance, Planning, and Policy Evaluation. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 5(2), 217–232.
- Yoga, G. A. D. M., & Diputra, G. I. S. (2024). Analisis Data Panel Determinan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *Ekuiilnmi*, 6(1), 1–15.
- Yuhani, O., & Setyaningrum, D. (2023). Measuring The Performance Of State-Owned Assets Through The Asset Management Index. *JRSSEM*, 3(4), 870–882.
- Yuhani, O., & Setyaningrum, D. (2024). Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan Menggunakan Modifikasi Indeks Pengelolaan Aset. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(1), 1–24.